

Praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok

Muhamad Isnaini^{1*)}, Sarwititi Sarwoprasodjo¹,
Rilus A. Kinseng¹, Kholil²

¹*Institut Pertanian Bogor*

Jalan Raya Dramaga, Bogor, Indonesia

²*Universitas Sahid*

Jalan Prof. Dr. Soepomo 84, Jakarta, Indonesia

Email: emisnaini@gmail.com, Phone: +6281311392357

How to Cite This Article: Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R.A., & Kholil, K. (2020). Praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(3). doi: 10.25139/jsk.v4i3.2468

Received: 19-03-2020,
Revision: 05-05-2020,
Acceptance: 23-07-2020,
Published online: 01-11-2020

English Title: *Practices of Digital Vigilantism on Social Media in Intergroup Conflict*

Abstract This research was conducted based on the frequent conflicts in Johar Baru sub-district, Central Jakarta. Tawuran or brawls has become a daily routine in that particular sub-district. This study aimed to analyse practices of digital vigilantism on social media amid intergroup conflict. Researchers explored Facebook accounts of several groups that are often involved in a conflict. This study used a qualitative content analysis method. The results revealed that digital vigilantism practices found were security, supervision, control, discipline, and punishment of one group against other groups through social media, where punishment, i.e. name-calling, and shaming are the most common practices, so that conflicts from the virtual world lead to conflicts in the real world.

Keywords: intergroup conflict; brawls; digital vigilantism; facebook

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi konflik rutin berbentuk tawuran antarkelompok yang telah menjadi keseharian masyarakat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok. Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini mengeksplorasi sejumlah akun media sosial Facebook (FB) yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang kerap terlibat dalam konflik. Analisis isi

*) Corresponding Author

kualitatif adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, praktik vigilantisme digital yang ditemukan adalah pengamanan, pengawasan, pengendalian, pendisiplinan, dan penghukuman satu kelompok terhadap kelompok lain melalui media sosial. Dari praktik-praktik tersebut, penghukuman berupa penamaan (*naming*) dan mempermalukan (*shaming*) adalah praktik yang paling sering dijalankan. Berawal dari praktik vigilantisme digital itulah yang pada akhirnya membuat konflik termanifestasi di dunia nyata.

Kata Kunci: konflik antarkelompok; tawuran; vigilantisme digital; facebook

PENGANTAR

Ruang yang semakin sesak akibat tekanan populasi membuat wilayah perkotaan menjadi rentan terhadap konflik. Menurut Muntaza (2011), konflik di perkotaan umumnya berbentuk perebutan sumber daya ekonomi. Meskipun demikian, kekerasan rutin, yang bermanifestasi dalam tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan juga kerap terjadi. Tadjoeeddin et al., (2012) mencatat, kepadatan penduduk serta dominasi usia remaja memainkan peran sentral dalam kekerasan rutin di perkotaan.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis juga tak luput dari masalah kekerasan rutin, utamanya adalah konflik antarkelompok yang berbentuk tawuran. Sejumlah tempat menjadi lokasi rutin tawuran antarkelompok, misalnya Matraman (Kotarumalos, 2004), Manggarai (Naufal, 2019), serta Johar Baru (BKBP, 2015). Fokus penelitian ini adalah tawuran antarkelompok di Kecamatan Johar Baru yang dipicu oleh kehadiran sejumlah kelompok "*nongkrong*" {Formatting Citation}. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian memanfaatkan media sosial untuk mengawasi, mengendalikan, dan bahkan menghukum kelompok lainnya. Praktik seperti itulah, oleh Trottier (2017) disebut sebagai vigilantisme digital, yakni warga atau sekelompok warga yang menyinggung, menghina, dan menyerang aktivitas warga atau kelompok warga lainnya yang diikuti dengan aksi saling balas pada media digital dan platform media sosial. Wibisono (2018) mengemukakan bahwa vigilantisme digital menjadikan satu kelompok mengawasi dan menghukum kelompok lain. Maka, yang muncul kemudian adalah unggahan dengan konten saling menjelekkan serta saling berbalas komentar dengan kasar. Dalam konteks konflik antarkelompok di Kecamatan Johar Baru, praktik vigilantisme digital di media sosial dapat bermuara pada tawuran sesungguhnya di dunia nyata.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kecamatan Johar Baru adalah satu dari 16 kecamatan di Jakarta yang menjadi daerah rawan konflik (BKBP, 2015). Tadie (2009) menjelaskan bahwa konflik sudah menjadi menu sehari-hari warga di kecamatan tersebut. Di salah satu kelurahan, yakni Tanah Tinggi, konflik yang ada sangat kasat mata dalam bentuk tawuran antarkampung/kelompok setiap harinya. Simone & Fauzan (2012) menyebut Kelurahan Tanah Tinggi sebagai

kelurahan terpadat di Jakarta, suatu tempat dimana untuk tidur sekalipun, harus bergantian. Dengan keragaman etnis yang kentara serta infrastruktur yang semakin menua, Tanah Tinggi menjadi kelurahan termiskin sekaligus paling berbahaya di Jakarta. Dua kelurahan lainnya di Kecamatan Johar Baru, yakni Galur dan Kampung Rawa bernasib serupa. Mereka mendapat julukan sebagai kelurahan yang paling rawan konflik di Jakarta (BKBP, 2015).

Mengacu pada pendapat Soeharto (2013), konflik yang muncul di Kecamatan Johar Baru dapat dikategorikan sebagai konflik sosial minor rural-urban. Konflik sosial minor rural-urban ini juga dapat dikategorikan sebagai konflik lokal (Barron et al., 2009). Tadjoeeddin (2002), yang dikuatkan oleh penelitian Darmajanti (2013) menyebut, konflik yang sering terjadi di Kecamatan Johar Baru termasuk dalam kategori kekerasan kolektif (*collective violence*) dengan sub-kategori *civil commotion* atau tawuran, yakni bentrokan antarkelompok, yang dapat menjalar menjadi konflik antarwarga atau bahkan lebih besar, yakni antarkampung.

Menurut Wirutomo (2016), tawuran di Kecamatan Johar Baru terjadi karena faktor struktural, kultur, dan proses yang saling terjalin. Masalah struktural disebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkontrol. Kurangnya lahan membuat kondisi perumahan di Kecamatan Johar Baru menjadi sangat buruk, sehingga penghuninya tinggal berdesak-desakan. Faktor kultural dipicu oleh kenyataan bahwa kehidupan sosial di Kecamatan Johar Baru memiliki ciri khas "budaya kemiskinan" yang dipicu oleh proses adaptasi terhadap kemiskinan struktural yang hadir sejak lama. Dinamika interaksi sehari-hari yang cair, fleksibel, serta dapat dinegosiasikan (*negotiable*) yang pada akhirnya menciptakan arena yang mengutamakan proses.

Kemunculan sejumlah kelompok *nongkrong* sebagai dampak kemiskinan, pengangguran, kekumuhan, kepadatan penduduk, pengasingan sosial, serta faktor struktural seperti terbatasnya ruang gerak dalam tempat tinggal mereka (Darmajanti, 2013), menambah rumit masalah di Kecamatan Johar Baru. Hal itu karena kelompok-kelompok *nongkrong* kerap kali memulai tawuran. Mauliate et al., (2014) memetakan sebanyak 40 kelompok di Kecamatan Johar Baru. Di antara 40 kelompok tersebut, yang sering melakukan konflik/tawuran antara lain kelompok "Kota Paris," "Bhaladewa," "Ghambrenk," "Madesu Gembrong," "Gogat," "Bonekar," "Jotet," "Gempal," "Bonawi," dan "Oblack." Sebagian besar kelompok tersebut terbentuk dengan basis teritorial yang tampak jelas pada pemberian nama kelompok. Kelompok-kelompok di Kecamatan Johar Baru juga tidak memiliki jumlah anggota dan struktur yang jelas. Meskipun demikian, kelompok-kelompok tersebut melekat teknologi informasi, terutama media sosial, yang sekaligus dimanfaatkan sebagai arena praktik komunikasi konflik berbentuk vigilantisme digital, yakni pengawasan dan penghukuman dari orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain (Trottier, 2017). Melalui media sosial itu

pula, terjadi lain saling cela dan adu mulut melalui komentar-komentar kasar antarkelompok.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana kelompok memanfaatkan media sosial, dalam hal ini adalah Facebook, sebagai arena perseteruan yang kemudian memicu konflik antarkelompok. Praktik vigilantisme digital muncul karena pewarisan dendam lama antara satu kelompok kepada kelompok lain, yang kemudian dilampiaskan di media sosial. Maka, media sosial tersebut menjadi ajang saling ejek, provokasi, komentar kasar, bahkan mengunggah kejelekan kelompok lawan untuk kemudian dilakukan perundungan melalui komentar yang merendahkan.

Keberadaan kelompok-kelompok yang berbasis teritorial seperti di Kecamatan Johar Baru memang rentan memicu ketegangan dan rivalitas (Klein et al., 2006). Beririsan dengan proses sosial yang terjadi di dalamnya, kekerasan dan konflik menjadi tak terhindarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Prihandono (2005) dan Aminah (2015) tentang kecenderungan teritorial pada kelompok-kelompok tertentu di perkotaan dan relasinya dengan konflik. Di samping itu, kelompok-kelompok tersebut sangat menjunjung tinggi ego dan identitas kelompok. Misalnya kelompok "Abapon," sangat kuat dengan identitas anak Betawi Pulo Gundul di pinggir kali Sentiong, berseteru dengan kelompok "Velbak" yang kental dengan identitas *multi*-etnik. Begitu juga dengan kelompok Gembrong yang melekat dengan identitas anak pasar, berseteru dengan Gang Intan yang lekat dengan identitas jawara.

Atas dasar itulah, teori identitas sosial menjadi pisau analisis penelitian ini dengan sejumlah alasan. Pertama, pemahaman atas kelompok sosial dan hubungan kelompok tersebut dengan konflik (Fajar, 2016). Kedua, proses diskriminasi yang muncul karena suatu kelompok berusaha meningkatkan bentuk persamaan antaranggota pada satu kelompok, sekaligus kelompok tersebut mencari perbedaan dengan kelompok lainnya (Gallois et al., 2005). Ketiga, satu kelompok masyarakat pada dasarnya diikat dengan solidaritas, yang secara langsung meningkatkan kohesi antaranggota kelompok (Fajar, 2016).

McLeod (2008) mengemukakan bahwa dalam teori identitas sosial, suatu kelompok akan mendiskriminasi kelompok lain. Hipotesis utama teori identitas sosial adalah bahwa anggota suatu kelompok berupaya menemukan aspek negatif dari kelompok lain. Berpijak pada hipotesis itu, maka konflik antarkelompok kemungkinan dipicu oleh perbedaan kepentingan dan upaya mencari perbedaan dengan kelompok lain.

Teori identitas sosial memberi ruang untuk mendapatkan penjelasan tentang penyebab konflik antarkelompok, yakni munculnya perbedaan kepentingan dengan kelompok lain. Lebih lanjut, menurut Fajar (2016), konflik antarkelompok muncul karena perbedaan kekuatan di antara tiap kelompok berdasarkan tiga kelas dalam manajemen sosial. Ketiga kelas tersebut adalah mobilitas sosial, yakni

upaya individu untuk meningkatkan identitas positif dari satu kelompok; kemudian kompetisi sosial, yakni suatu kelompok akan meningkatkan perlawanan pada kelompok dominan; dan kreativitas sosial, yakni upaya strategis kelompok untuk meningkatkan kemampuan melawan kelompok dominan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang konflik tersebut. Misalnya oleh Umar & Anom (2011) yang meneliti penyebab konflik di Kecamatan Johar Baru, kemudian Darmajanti (2013) yang menelisik anatomi konflik di daerah tersebut. Begitu juga dengan penelitian Sumarno (2014) dan Wirutomo (2016). Penelitian Munawar (2013) menunjukkan keterkaitan antara konflik di Kecamatan Johar Baru dengan ketahanan wilayah. Sementara, penelitian oleh Aji (2017) menitikberatkan pada peran kontrol sosial keluarga dan keterlibatan pemuda pada konflik tersebut. Darmajanti & Suleeman (2017) mengkaji konteks sosial budaya di Kecamatan Johar Baru, sementara Yasmine (2017), di samping berhasil mengungkap keberadaan kelompok sebagai salah satu aktor utama tawuran, juga berhasil mengurai akar masalah yang mengimpit kaum muda di Kecamatan Johar Baru. Ruwaida (2017) menawarkan upaya yang telah dilakukan untuk merajut harmoni sosial di kawasan tersebut. Dalam konflik yang melibatkan kelompok, penelitian Halevy et al., (2014) menunjukkan bahwa motif individu ikut serta dalam konflik karena kecintaan pada kelompoknya dan kebencian pada kelompok lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok. Topik ini menarik diteliti karena konflik kolektif (antarkelompok) telah menjadi kekerasan rutin yang dipandang remeh, meskipun banyak menimbulkan korban akibat tawuran, penghakiman massa dan pengeroyokan (Saputra, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai adalah analisis isi kualitatif. Menurut Krippendorff (2004) dan Neuendorf & Kumar (2015), analisis isi adalah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks dengan prosedur yang ketat, absah, serta dapat diulang atau diterapkan dalam konteks yang berbeda. Hsieh & E.Shannon (2005) menerangkan bahwa analisis isi kualitatif merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menganalisis data berupa teks. Meskipun demikian, menurut Elo & Kyngäs (2008), penggunaan analisis isi kualitatif memiliki kerugian berupa pertanyaan penelitian yang ambigu. Lebih lanjut Elo & Kyngäs (2008) menerangkan bahwa analisis isi kualitatif dapat membuat peneliti memahami teks dengan mengelompokkan kata-kata ke dalam kategori-kategori, yang pada akhirnya terbangun sebuah model atau sistem konseptual. Hal ini sejalan dengan pandangan Bazeley (2009) yang mengemukakan bahwa ketika menganalisis data kualitatif, tidak hanya berhenti pada proses mengidentifikasi data, tetapi juga

menjelaskan konteksnya serta membuat hubungan di antara tema-tema.

Penelitian ini menggunakan data berupa konten (teks, gambar, dan video) akun media sosial Facebook (FB) yang dimiliki oleh sejumlah kelompok yang sering tawuran (Tabel 1). Untuk memperkuat data hasil analisis isi, penelitian ini mewawancarai sejumlah informan kunci dari kelompok-kelompok yang selama ini berseteru di Kecamatan Johar Baru.

Tabel 1. Akun media sosial Facebook yang diteliti

Kelompok	Teritorial	Akun Facebook/FB	Sifat	Dibuat
"Kota Paris"/"Kopar"	Pinggir Kali Sentiong-Jln. Baladewa	"Kopar" 340"	Publik	2013
"Bhengal"	Jln. Kampung Rawa Sawah, Kp. Rawa	"Bhengal" 3739"	Publik	2013
"Abapon"	Jln. Pulo Gundul	"Abapon Vs Velback"	Publik	2013
"Golday"	Jln. Kampung Rawa Sawah	"Golday City 338"	Publik	2016

Sumber: Olahan data penelitian (2019)

Data penelitian ini juga diperkuat dengan wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Sebagai informan utama adalah AL, HP, IK dan BA yang merupakan *dedengkot* sekaligus admin akun FB kelompok "Kopar," "Bhengal," "Abapon," dan "Golday." Informan pendukung adalah FJ, tokoh masyarakat yang menjadi saksi sejarah berdirinya kelompok-kelompok jalanan di Kecamatan Johar Baru, dan AG, mantan pemimpin kelompok jalanan yang kini beralih menjadi sukarelawan dalam pemberdayaan remaja.

Untuk memeriksa keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Huberman & Miles, 2009), utamanya adalah triangulasi teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumen) sehingga dapat memperkuat tafsir hasil penelitian (Bachri, 2010). Dengan demikian, penelitian ini memeriksa ulang data yang diperoleh melalui observasi teks di media sosial FB dengan hasil wawancara para informan dan dokumen-dokumen terkait konflik antarkelompok di Kecamatan Johar Baru. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Renz et al., (2018), yang mengemukakan bahwa triangulasi pada analisis isi kualitatif dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang fenomena konten yang diteliti, apakah itu berupa wawasan kultural ataupun historisitas. Selain itu, triangulasi juga dapat memperkuat konstruksi teoretis atas penelitian yang dilakukan (Humble, 2009)

TEMUAN HASIL DAN DISKUSI

Facebook Sebagai Arena Konflik

Salah satu karakteristik kelompok yang ditemui dalam penelitian ini adalah kepemilikan media sosial sebagai sarana komunikasi. Media sosial yang digunakan adalah FB. Selain sebagai sarana komunikasi,

misalnya ajakan untuk berkumpul, FB juga digunakan oleh kelompok sebagai media untuk saling hujat, perang komentar, atau bahkan penghukuman.

Hasil observasi atas sejumlah akun FB kelompok (Tabel 1) menunjukkan, akun-akun tersebut merupakan akun resmi (*official*) kelompok, memiliki admin, dan bersifat terbuka/publik. FB dipilih karena platform media sosial tersebut mudah, sederhana, praktis, serta populer dibandingkan platform media sosial lainnya. Pilihan pada FB juga dilandasi alasan platform tersebut sudah familier dengan anggota kelompok yang rata-rata memiliki pendidikan rendah.

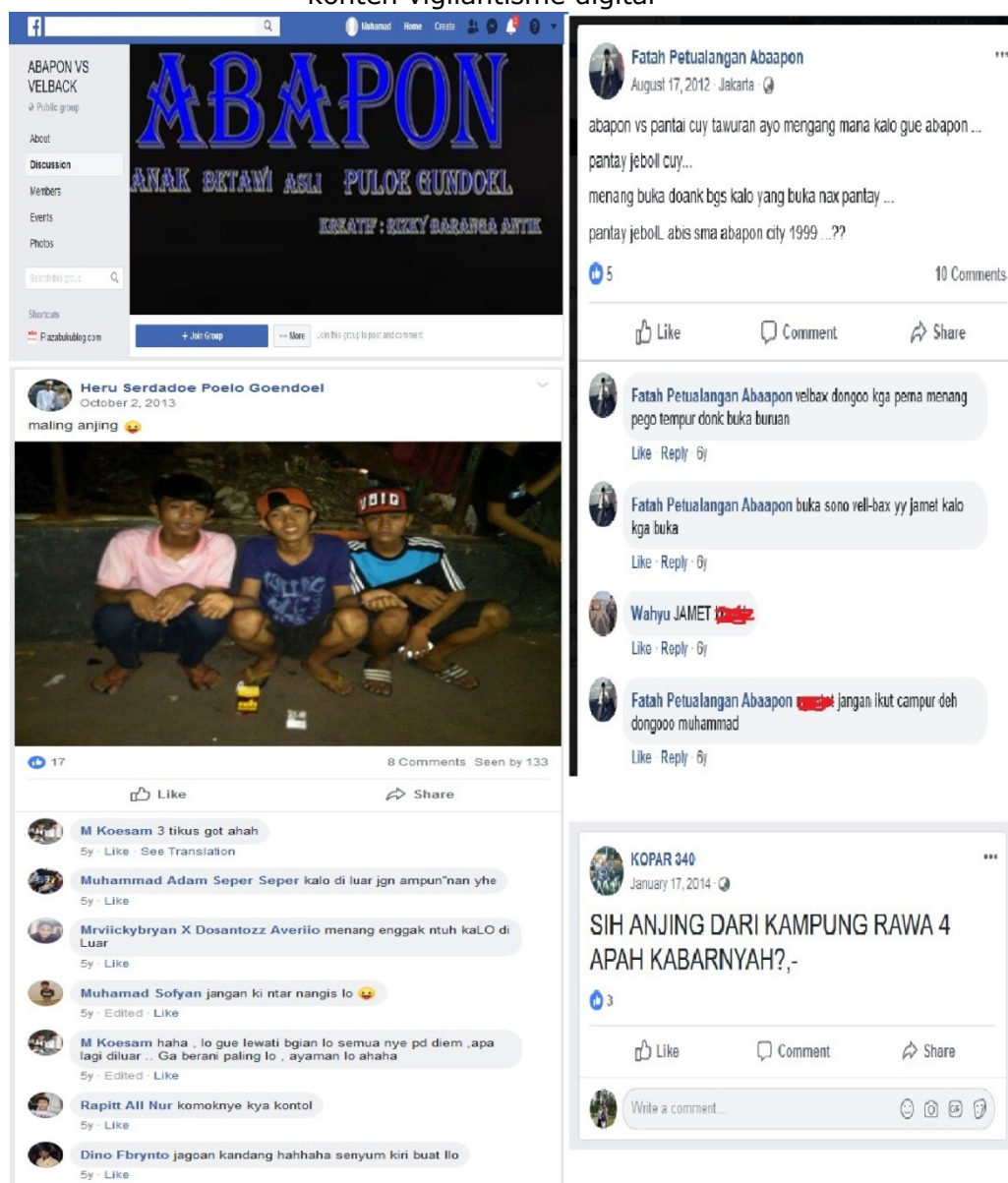
Inter-aktivitas, anonimitas, mempunyai sifat persuasif yang kuat, serta informatif menjadi alasan kelompok mempunyai akun di media sosial. Dengan media sosial tersebut, kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kelompok dapat dipantau anggota yang lain. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan vigilantisme, misalnya yang menyangkut penghakiman/penghukuman terhadap kelompok lain, sebagaimana dikemukakan oleh informan AL berikut ini: "Facebook juga ada, jadi kalo ada apa-apa juga kita bisa tau, kalo temen kita kenapa-napa juga langsung bisa tau" (Wawancara dengan AL).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan HP. Menurutnya, sebelum tawuran dengan kelompok lain, biasanya FB digunakan untuk memuat pengumuman mengenai kesiapan kelompok, titik temu, serta persiapan lainnya. Pengumuman tersebut dimuat setidaknya satu hari sebelumnya. Respons dari para anggota kelompok sendiri dan kelompok lawan menentukan apakah tawuran dapat berlangsung atau tidak. Selengkapnya HP mengatakan: "Sebelum tawuran ya itu yang saya bilang tadi mau ngumpulnya di mana, terus diulang lagi di grup whatsapp. Tapi kita harus hati-hati pake Facebook karena bisa jadi barang bukti" (Wawancara dengan HP).

Kedua informan tersebut mengemukakan bahwa FB dapat digunakan untuk menampung ide-ide kelompok, terutama yang terkait dengan tawuran. Hal tersebut dikuatkan oleh informan BA dan IK yang mengungkapkan bahwa FB dapat digunakan untuk menentukan waktu kapan berkumpul, kelompok mana yang akan diserang, dan lokasi pertemuan antaranggota kelompok. Dengan membuat akun FB sebagai grup publik, maka pesan-pesan yang dibuat, yakni pesan-pesan yang memiliki tendensi kebencian dan ancaman dapat dilihat oleh kelompok lain sehingga dapat menimbulkan efek kejut berupa rasa ketakutan.

Pesan/konten di media sosial inilah yang menjadi titik tengkar berlangsungnya "perang urat saraf" atau "tawuran di dunia maya" antarkelompok. Sejumlah konten dengan terang-terangan menjelek-jelekkan kelompok lain atau anggotanya (Gambar 1). Konten tersebut kemudian dibalas dengan komentar bernada sarkasme. Saling berbalas komentar itu pula yang menjadi cikal bakal konflik di lapangan.

Gambar 1. Tangkapan layar akun FB kelompok “Abapon” dan “Kopar” dengan konten vigilantisme digital



Sumber: Data peneliti (2020)

Pada Gambar 1 di atas, anggota kelompok “Abapon” mengunggah foto tiga orang anggota kelompok musuh, yakni “Velback.” Komentar yang muncul langsung menjelek-jelekkan ketiga orang tersebut, misalnya, “3 tikus got, *ahaha*,” yang kemudian dibalas dengan komentar: “*kalo diluar jangan ampun2an yhe*,” serta: “*haha, lo gue lewati bagian lo semuanya pd diem, apalagi di luar...Ga berani paling lo, ayaman lo ahaha*.” Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena pengawasan dan penghukuman bagi anggota kelompok lain. Begitu juga dengan unggah mengenai tawuran antara “Abapon” dengan kelompok Pantai. Ketika anggota Pantai memberi komentar: “*JAMET...*,” oleh anggota “Abapon” langsung dibalas dengan: “*...Jangan ikut campur deh dongo*.”

Bagaimana proses pengawasan dan penghukuman di media sosial, yang menjadi bagian praktik vigilantisme digital tersebut berlangsung, secara lebih jelas dapat dilihat di Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Tangkapan layar akun FB kelompok "Kota Paris" yang memuat praktik pengawasan



Sumber: Tangkapan layar akun FB kelompok "Kopar"

Gambar di atas menjelaskan bagaimana FB dimanfaatkan sebagai arena konflik. Akun FB "Kopar" memuat komentar mengenai rencana untuk tawuran pada malam hari (12 Mei 2013) sekitar pukul 19.00 malam. Karena akun tersebut bersifat publik, maka siapa saja dapat memberikan komentar. Komentar dari seorang warganet menyarankan agar kelompok tersebut tidak begadang. Menariknya adalah komentar dari warganet yang merupakan anggota kelompok "Bhengal" (musuh kelompok "Kopar"), yakni: "...yang elo bakar kampung "Gogat" bukan kampung w..." Komentar tersebut dibalas admin kelompok "Kopar" 340 dengan: "...jangan bacot bang.."

Praktik-praktik Vigilantisme Digital

Dalam konteks konflik antarkelompok, para aktor melakukan patroli, yakni menelisik konten kelompok lain di media sosial, mengunggah atau mempublikasikan kalimat sarkasme tentang kelompok lain, dan memberi komentar mengenai suatu kejadian yang terkait dengan kelompok lawan. Saling unggah dan balas komentar itulah yang pada akhirnya menyulut konflik nyata. Selain pengawasan dan penghukuman, praktik-praktik vigilantisme digital lainnya disajikan di Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Identifikasi praktik vigilantisme digital dalam konflik antarkelompok

No.	Unsur Vigilantisme	Praktik di Media Sosial
1	Pengamanan	• Unggah di laman akun FB Kramat Jaya yang menyebut anggota Jotet sebagai: "komok jange." • Unggahan admin "Kopar" 340 tentang kelompok "Bhengal": "Sih Anjing dari Kampung Rawa 4 Apa Kabarnya?"
2	Pengawasan	Admin "Kopar 340" yang mengunggah: "Laen deh yang udah maen di bagian musuh anak2gue!!! Senyumin aje."
3	Penghukuman	Kelompok "Abapon" mengunggah lima foto diri anggota kelompok lawan, yakni "Velback" dengan keterangan "anak-anak yang dicari tongkrongan gue." Komentar yang muncul antara lain: "lihat yang pake baju Juventus kaya tukang semir sepatu," "bukan tukang semir bgo, itu tukang beling," dan "5 org gembel sentiong." Praktik seperti ini termasuk praktik <i>naming</i> atau menamai dan <i>shaming</i> atau mempermalukan
4	Pengendalian	Seorang anggota yang mengunggah di dinding laman FB "Bhengal 3739": "Kapan Nih Perang Lagi." Komentar yang muncul antara lain: "Besok," dan "hahaha"
5	Pendisiplinan	• Di dinding akun FB kelompok G.A.V ("Gogat", "Andepus," "Velback 35") seorang anggota mengunggah, "Susah Klo Punya Teman Penghianat #F\$\$k_you." Komentar yang muncul, antara lain: "betul...betul...betul," dan "singkirkan." • Di dinding akun FB "Kopar" 340, admin mengunggah: "pengkhianat tidak pantas bersama kami." Komentar yang muncul antara lain: "siap bereskan."

Sumber: Olahan penelitian (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik vigilantisme digital di media sosial merupakan arena yang berpotensi besar menjadi fasilitator konflik antarkelompok. Sebab, antara kelompok yang satu dengan kelompok lain saling mengunggah hinaan, yang dilanjutkan dengan saling komentar kasar dan bersifat merisak (merundung/*bully*). Hal ini sejalan dengan pandangan Cheong & Gong (2010) yang menyatakan bahwa media baru, khususnya platform berbagi video dan jejaring sosial, memfasilitasi penciptaan dan perputaran konten para pengguna internet yang menargetkan pada orang atau kelompok tertentu, yang tak jarang justru memicu konflik.

Loveluck (2019) mengemukakan, vigilantisme adalah ekspresi berupa kekerasan dari kekuatan kolektif untuk mencari atau mengembalikan keteraturan melalui penghukuman langsung, sebagai lawan dari peraturan yang dibuat oleh institusi resmi. Terminologi vigilantisme itu kemudian diserap ke arena dalam jaringan (daring) menjadi vigilantisme digital, yakni tindakan langsung secara daring

sebagai tanggapan/respons atas pelanggaran, kriminal, kesenjangan, balas dendam, atau kebencian. Hal inilah yang terjadi pada kelompok-kelompok yang bertikai di Kecamatan Johar Baru. Praktik vigilantisme digital yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tersebut dilandasi oleh balas dendam dan kebencian yang sudah turun-temurun, sebagaimana dikemukakan oleh informan FJ berikut ini:

Di sini sejak 80-an konflik karena bola, ya sisanya masih ada sekarang, sisa dendam dan benci yang turun-temurun. Kalo bola itu kan wajar, di mana pun jangan kan Persib dan Persija terjadi apalagi bola kampung biasa. Kalo inikan kelihatannya ada yang berkepentingan kelihatannya soalnya wilayah Johar Baru dan wilayah kita satu kecamatan tawuran, Tanah Tinggi warga "Abapon" sama "Tanah Gundul," terus Tanah Tinggi sama "Kota Paris", "gang T" sama kampung rawa nah itu kayaknya dibentuk gitu, bisa jadi oleh media-media sosial milik kelompok yang ikut lestariin dendam (Wawancara dengan FJ).

Konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru biasanya menetap dan berlangsung terus-menerus. Adakalanya, dalam satu kejadian konflik, yang mulanya hanya melibatkan kelompok, kemudian menjalar dengan melibatkan warga sekitar. Keterlibatan warga tersebut bukannya tanpa alasan. Paling utama adalah solidaritas yang terbangun antara kelompok jalanan dengan masyarakat sekitar (Bahri, 2002) atau karena masyarakat sekitar terganggu dengan ancaman dan serangan kelompok lain (Kotarumalos, 2004).

Wirutomo & Darmajanti (2017) berpandangan bahwa selain solidaritas, rasa kesal dan marah juga ditengarai menyebabkan tawuran menjalar, dari yang semula antarkelompok menjadi antarwarga. Warga marah karena wilayahnya dimasuki dan diserang oleh kelompok lain. Motivasi mempertahankan diri itulah yang melatarbelakangi keikutsertaan warga dalam tawuran. Ditambah dengan mekanisme berdasarkan proses, yakni dengan kehadiran internet berupa media sosial menjadikan konflik kian meruncing. Hal senada juga dikemukakan oleh Tadie (2009) yang menyebut bahwa tawuran antarkelompok yang berubah menjadi tawuran antarwarga terjadi karena ungkapan rivalitas antar wilayah.

Selain itu, daerah padat seperti Kecamatan Johar Baru memiliki tingkat mobilitas horizontal yang rendah. Menurut Bahri (2002), mobilitas horizontal yang rendah itu, menyebabkan pewarisan dendam berlangsung secara kontinu. Pewarisan dendam terjadi melalui lingkungan yang menyimpan potensi konflik. Sehingga, anak yang lahir dan tumbuh di wilayah tersebut akan mengambil alih dendam orang tua mereka. Dengan kata lain, warga mengalami internalisasi dendam sejak dini sehingga kebencian terhadap kelompok lain terpelihara. Dalam masyarakat seperti itu, tawuran massal merupakan

sesuatu yang bersifat laten dan dapat muncul kapan saja bila kesempatan tersedia.

Informan AG berkisah tentang bagaimana pewarisan dendam tersebut terjadi. Awalnya adalah tawuran pada tahun 2001 yang menewaskan 4 orang di Pasar Gembrong. Hal tersebut kemudian menjadi dendam lama yang selalu diungkit jika terjadi tawuran di Kampung Rawa. Masalahnya, dendam lama tersebut tidak berusaha untuk dihapuskan atau dihilangkan. AG bercerita bahwa ada segelintir ketua kelompok yang menceritakan kejadian tersebut kepada generasi di bawahnya. Dendam tersebut kemudian terbawa dari generasi ke generasi sehingga jika tersulut sedikit saja, dapat memantik tawuran. Pewarisan dendam tersebut berlangsung jauh sebelum era media sosial. Ketika media sosial semakin mudah diakses, bahkan oleh kalangan miskin sekalipun, maka dendam semakin mudah diungkapkan. Dengan demikian, media sosial yang dimiliki oleh sejumlah kelompok ikut membuat rumit pewarisan dendam tersebut dengan konten yang provokatif dan destruktif berupa praktik vigilantisme digital.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Loveluck (2019), vigilantisme digital adalah istilah yang kompleks dengan dua alasan. Pertama, vigilantisme digital tidak serta-merta dipahami sebagai kekerasan sebagai sebuah tindakan atau pemaksaan fisik, sejauh sebagian besar tindakan daring tersebut mengambil bentuk pengaduan publik untuk memicu respons dari pihak berwenang dan sistem peradilan. Hanya saja, yang paling banyak terjadi adalah bentuk kekerasan dalam ruang daring, misalnya dalam bentuk *naming*, *shaming*, atau *doxing*. Kedua, internet telah membuat prakarsa semacam itu lebih mudah dan bahkan lumrah. Pada praktiknya, bentuk vigilantisme digital yang pertamalah yang kerap ditemui dalam konflik antarkelompok di Kecamatan Johar Baru dengan manifestasi pengamanan, pengawasan, penghukuman (*naming* dan *shaming*), pengendalian, dan pendisiplinan.

Menurut Trottier (2017), vigilantisme digital adalah bentuk tindakan yang dimediasi dan terkoordinasi. Titik tolaknya adalah kemarahan atas pelanggaran atau terhadap suatu tindakan, yang kemudian dikirim melalui perangkat seluler dan melalui platform media sosial. Pengguna berusaha untuk membuat individu yang ditargetkan terlihat melalui praktik berbagi informasi seperti mengumpulkan dan mempublikasikan data pribadi mereka (*doxing*). Lebih lanjut menurut Trottier, ketika vigilantisme diekspresikan melalui media digital, yang dilakukan adalah mencari dan mengedarkan informasi pribadi pelanggar yang ditargetkan. Tujuan tindakan tersebut tidak hanya berbagi informasi dalam berbagi data tentang pelanggaran, tetapi juga hukuman yang sengaja diberlakukan terhadap target. Cheong & Gong (2010) mengemukakan, di tengah konvergensi media, vigilantisme digital hadir sebagai bentuk trans-mediasi informasi yang melintasi beragam platform media. Hal itu terjadi karena pengguna terlibat

antara satu dengan yang lainnya untuk menyebarkan informasi atau menciptakan narasi baru.

Wibisono (2018) mengungkapkan, praktik vigilantisme digital muncul sebagai respons atas penyebaran ujaran kebencian. Landasannya adalah rasa tidak puas atas pelaporan konten negatif ke pengelola platform media sosial. Pada era media sosial, model vigilantisme klasik, yakni pengamanan, pengawasan, pengendalian, pendisiplinan, dan penghukuman terjadi melalui mekanisme mutakhir sebagai persilangan antara kemunculan warga baru yaitu warganet (*netizen*), penggunaan berbagai bentuk media sosial dan perebutan standar moral ruang publik.

Hasil penelitian tentang vigilantisme digital ini sejalan dengan temuan Kasra (2017) yang menyebut bahwa jaringan digital membawa pada bentuk-bentuk ekspresi yang egaliter, partisipasi, dan advokasi politik, namun dengan cara yang sama jaringan digital juga memungkinkan cara-cara baru kendali yang menekan individu dan komunitas yang dapat dieksploitasi secara visual untuk tujuan kejahatan. Menurut Kasra, seperti media komunikasi lainnya, jaringan digital secara bersamaan menjanjikan untuk membebaskan individu dan kelompok dalam berekspresi, namun dapat juga digunakan untuk melakukan penindasan, misalnya dengan merundung dan, misalnya dengan mempermalukan orang/kelompok. Karena itulah, meningkatnya jaringan digital untuk mengendalikan dan meneror khalayak internet perlu untuk mendapatkan pengawasan lebih ketat.

Hal yang sama juga diperoleh dari penelitian Dunsby & Howes (2019) yang menemukan bahwa aktivitas vigilantisme digital melalui media sosial memiliki konsekuensi negatif di dunia sosial yang lebih luas. Salah satu contoh vigilantisme digital adalah penamaan (*naming*) dan mempermalukan (*shaming*) orang-orang yang dihukum atau diduga melakukan kejahatan dan menjadikan mereka malu dan merasa dilecehkan. Dengan responden pengguna Facebook, penelitian Dunsby dan Howes mengungkap, banyak pengguna Facebook menganggap praktik *naming* dan *shaming* bagi orang yang dicurigai sebagai tindakan tidak pantas, namun hal tersebut menjadi pantas ketika menyangkut pelaku kekerasan seksual dan kekerasan lainnya.

Sebagaimana dikemukakan Wibisono (2018), munculnya kelompok vigilantisme di media sosial adalah pembentukan standar moral berdasarkan interpretasi sendiri, yakni regulasi yang tidak tercatat (tertulis) mengenai konten apa saja yang pantas untuk disebarluaskan atau diberi komentar. Pemberlakuan standar tersebut berfungsi menertibkan segala perbuatan, ide, gagasan, dan ujaran. Hal itu karena ada kelompok yang mengawasi serta memberikan hukuman atas aktivitas warganet di media sosial.

Vigilantisme digital adalah bentuk tindakan yang dimediasi dan terkoordinasi (Chia, 2019). Ide dasarnya adalah kemarahan atas pelanggaran atau terhadap suatu tindakan, yang kemudian dikirim melalui perangkat seluler dan melalui platform media sosial. Pengguna

berusaha untuk membuat individu/kelompok yang ditargetkan terlihat melalui praktik berbagi informasi seperti mengumpulkan dan mempublikasikan rincian pribadi atau kelompok mereka (Trottier, 2017).

Menurut Neubaum et al., (2018), vigilantisme digital tidak dapat dilepaskan dari praktik "*cyberbullying*" perundungan daring, di mana seseorang atau kelompok menggunakan teknologi (media sosial) untuk mempermalukan dan mencemarkan orang atau kelompok lain. Relasinya dengan konflik antarkelompok adalah, ketika orang/kelompok menerima pesan (konten/unggah) melalui Facebook, penerima pesan berpikir bahwa konten tersebut dapat membantu memerangi kejahatan dengan menyukai dan membagikan konten tersebut. Keyakinan tersebut diperkuat dengan persepsi bahwa sekelompok besar pengguna media sosial lainnya "menyetujui" konten tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena layanan komunikasi seperti Facebook menyediakan pesan (yakni konten yang diciptakan pengguna untuk melakukan vigilantisme) yang dikombinasikan dengan komentar orang/kelompok lain serta informasi mengenai seberapa banyak orang/kelompok yang menyukai atau membagikan konten tersebut. Di samping itu, pengguna juga dapat mengetahui berapa banyak pengguna lain yang bereaksi atas konten kontroversial.

Pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan Trottier (2019) praktik vigilantisme digital, termasuk di dalamnya *shaming* bentuk kekerasan kultural lainnya, belum diatur dengan tegas. Praktik tersebut dapat saja memperoleh asupan dari negara, institusi lokal, atau dalam kasus di Kecamatan Johar Baru, kelompok-kelompok yang bertikai untuk mempermalukan target (orang/kelompok lain), atau sekadar mengumpulkan informasi tentang orang/kelompok lain tersebut. Dengan demikian, vigilantisme digital tetap menjadi praktik yang diperdebatkan: terminologinya yang belum jelas, seperti dikemukakan Loveluck (2019), serta wacana publik yang beragam, tergantung pada tingkat serangan, respons, identitas pengguna, serta afiliasinya.

Meskipun tetap selalu ada kemungkinan untuk menyerang pihak lain, vigilantisme digital mensyaratkan pada partisipasi dan interaksi pengguna dan pihak lain. Tanpa hal tersebut, praktik vigilantisme digital tidak akan berjalan. Menurut Trottier (2019), budaya media kontemporer memungkinkan setiap orang untuk merekayasa dan mengeksploitasi visibilitas individu/kelompok yang ditargetkan untuk berbagai tujuan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut tidak hanya melalui pengambilan cuplikan asli dari suatu target, atau dengan mengambil alih konten yang sudah tersedia secara daring, tetapi melalui vigilantisme digital, dengan cara pembuatan konten gambar atau video agar tujuan pengamanan, pengawasan, penghukuman, pendisiplinan, dan pengendalian, dapat tercapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik vigilantisme digital merupakan upaya satu kelompok untuk mendiskriminasi dan

menyingkirkan kelompok lain melalui penggunaan media sosial. Hal ini bersesuaian dengan pandangan teori identitas sosial yang menyatakan bahwa dalam konflik, selalu terdapat perbedaan kepentingan dengan kelompok lain. Dalam kasus ini, kelompok yang setiap saat berseteru berpandangan ada kelompok lain yang harus disingkirkan sehingga tidak menghambat kepentingan kelompoknya. Misalnya kelompok "Kopar" yang menguasai teritorial di sekitar bantaran kali Sentiong dan ramai dengan pedagang kaki lima, berupaya mempertahankan wilayah tersebut karena menjadi sumber ekonomi kelompok dengan memungut iuran sewa lapak. Di sisi lain, kelompok "Bhengal" yang menjadi musuh abadi "Kopar", dengan teritorial yang berdekatan, juga berupaya memperoleh kapital dari pedagang tersebut. Tak heran jika kelompok "Kopar" dan "Bhengal" selalu terjadi gesekan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang berujung pada tawuran. Dengan kata lain, terjadi kompetisi sosial, yakni suatu kelompok akan meningkatkan perlawanan pada kelompok lain, terutama yang lebih dominan melalui tawuran. Perseteruan "Kopar" dan Benga tidak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan juga di media sosial (Lihat kembali Gambar 2) yang kemudian berujung pada tawuran setelah kedua kelompok tersebut mempraktikkan vigilantisme digital.

Hal tersebut menguatkan pandangan Maksum (2009), yang menyatakan bahwa konflik antarkelompok salah satunya disebabkan identitas kelompok. Atas dasar itulah kemudian muncul anggapan bahwa kelompoknyalah yang paling absah, sedangkan kelompok lain dipandang keliru. Mengambil anggapan ini atas konflik antarkelompok yang terjadi di Kecamatan Johar Baru, maka kuat dugaan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan praktik pembenaran melalui media sosial atas kelompok lainnya sehingga memunculkan konflik.

Masing-masing kelompok jalanan di Kecamatan Johar Baru sudah memiliki musuh abadi. Misalnya "Kopar" dengan "Bhengal," "Abapon" dengan "Velbak," atau "PBR" dengan "Gemvall." Karena itu, di media sosial, hanya kelompok-kelompok yang berseterulah yang saling berkomentar kasar dan mempraktikkan vigilantisme digital. Identitas kolektif dalam kelompok yang dimanifestasikan dalam praktik vigilantisme digital tersebut pada akhirnya memantik tindakan kolektif dalam bentuk tawuran. Identitas tersebut, sebagaimana pandangan Teori Identitas Sosial yang dikemukakan oleh Tajfel, merupakan sumber kebanggaan dan percaya diri (Hogg, 2016). Identitas yang terbentuk membuat kelompok mendiskriminasi kelompok lain untuk meningkatkan citra diri mereka. Dengan demikian, anggota kelompok berusaha menemukan aspek negatif dari kelompok lain (McLeod, 2008), sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik antarkelompok.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan, penyebab-penyebab di luar kemiskinan, kepadatan penduduk, dan banyaknya pengangguran di kalangan pemuda, berperan memantik konflik, salah satunya adalah kehadiran media sosial melalui praktik vigilantisme digital yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berseteru. Praktik vigilantisme digital dilakukan sebagai wujud pelampiasan dendam yang sudah diwariskan sejak lama kepada kelompok lain. Praktik vigilantisme digital yang ditemukan adalah praktik pengamanan, pengawasan, pengendalian, pendisiplinan, dan penghukuman satu kelompok terhadap kelompok lain melalui media sosial. Maka, yang muncul kemudian di media sosial adalah bagaimana wajah anggota kelompok lawan diunggah, diberi keterangan, kemudian memunculkan komentar bernada merendahkan. Praktik penghukuman berupa penamaan (*naming*) dan mempermalukan (*shaming*) menjadi hal yang lumrah di akun media sosial kelompok-kelompok tersebut.

Secara teoretis, pada dasarnya media sosial, dalam hal ini FB, adalah pencerita (*storyteller*) bagi tiap-tiap kelompok yang berseteru di Kecamatan Johar Baru. Melalui kacamata teori identitas sosial, dapat diketahui bagaimana pandangan kelompok satu terhadap kelompok lain yang bersifat destruktif sehingga memicu ketegangan antarkelompok. Sebagaimana argumen dalam teori identitas sosial, para *storyteller* tersebut mempunyai pandangan tersendiri atas konflik, yang cenderung stigmatik dan diskriminatif. Pandangan-pandangan seperti itulah yang kemudian melahirkan tawuran antarkelompok. Hasil penelitian ini juga memperkuat posisi teori identitas sosial sebagai salah satu teori yang berperan untuk melihat fenomena konflik antarkelompok dalam perspektif komunikasi konflik. Ke depannya, agenda penelitian tentang vigilantisme digital ini akan semakin menantang karena pengguna media sosial di Indonesia yang terus meningkat. Selain FB, platform media sosial yang lain, misalnya Twitter dan Instagram juga menunjukkan kecenderungan terjadinya praktik vigilantisme digital. Belum lagi, kondisi di Indonesia yang masih terbelah pasca pemilihan presiden (Pilpres) lalu melahirkan kelompok-kelompok yang memanfaatkan media sosial untuk mengawasi dan menghukum kelompok lain yang berseberangan. Pada masa datang, praktik vigilantisme digital yang terus berlangsung, membuka ruang-ruang penelitian baru dengan objek kajian yang lebih beragam.

REFERENSI

- Aji, D. S. (2017). Kontrol sosial keluarga dan kekerasan kolektif: Studi kasus keterlibatan pemuda dalam tawuran warga di Johar Baru, Jakarta Pusat. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22(2), 159–184. <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i2.7759>
- Aminah, S. (2015). Konflik dan kontestasi penataan ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(80), 59–79. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.

- Bahri, S. (2002). *Perkelahian massal antarwarga di Jakarta 1970-2000*. Universitas Indonesia.
- Barron, P., Kaiser, K., & Pradhan, M. (2009). Understanding variations in local conflict: Evidence and implications from Indonesia. *World Development*, 37(3), 698–713. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.007>
- Bazeley, P. (2009). Analysing qualitative data: More than indentifying themes. *Malaysian Journal of Qualitative Research*, 2(9), 6–22. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.2240&rep=rep1&type=pdf>
- BKBP. (2015). *Peta kawasan rawan konflik DKI Jakarta*. <https://jakarta.go.id/dokumen/2602/peta-kawasan-rawan-konflik-provinsi-dki-jakarta-tahun-2015>
- Cheong, P. H., & Gong, J. (2010). Cyber vigilantism, transmedia collective intelligence, and civic participation. *Chinese Journal of Communication*, 3(4), 471–487. <https://doi.org/10.1080/17544750.2010.516580>
- Chia, S. C. (2019). Seeking justice on the web: How news media and social norms drive the practice of cyber vigilantism. *Social Science Computer Review*, 1–18. <https://doi.org/10.1177/0894439319842190>
- Darmajanti, L. (2013). "The art of violence": Arts reconstruction of violence in multicultural community urban poor Jakarta. *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization,"* 373–389.
- Darmajanti, L., & Suleeman, E. (2017). Kecamatan Johar Baru: Konteks sosial budaya. In D. I. Yasmine & I. Ruwaida (Eds.), *Perang tanpa alasan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kasus tawuran di komunitas pemuda Johar Baru Jakarta Pusat* (pp. 1–23). Pustaka Obor.
- Dunsby, R. M., & Howes, L. M. (2019). The NEW adventures of the digital vigilante! Facebook users' views on online naming and shaming. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 52(1), 41–59. <https://doi.org/10.1177/0004865818778736>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Fajar, D. P. (2016). *Teori-teori konflik komunikasi: Upaya memahami dan memetakan konflik*. UB Press.
- Gallois, C., McKay, S., & Pittam, J. (2005). Intergroup communication and identity: Intercultural, organisational, and health communication. In K. L. Fitch & R. E. Sanders (Eds.), *Handbook of language and social interaction* (pp. 231–252). Lawrence Erlbaum Associates.
- Halevy, N., Bornstein, G., & Sagiv, L. (2014). "In-group love" and hate "as motives for individual participation in intergroup conflict. 19(4), 405–411. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02100.x>
- Hogg, M. A. (2016). Social identity theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), *Understanding peace and conflict through social identity theory* (pp. 3–17). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6>
- Hsieh, H.-F., & E.Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2009). Manajemen data dan metode analisis. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 591–612). Pustaka Pelajar.
- Humble, Á. M. (2009). Technique triangulation for validation in directed content analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(3), 34–51. <https://doi.org/10.1177/160940690900800305>
- Kasra, M. (2017). Vigilantism, public shaming, and social media hegemony: The role of digital-networked images in humiliation and sociopolitical control. *Communication Review*, 20(3), 172–188.

- <https://doi.org/10.1080/10714421.2017.1343068>
- Klein, M. W., Weerman, F. M., & Thornberry, T. P. (2006). Street gang violence in Europe. *European Journal of Criminology*, 3(4), 413-437. <https://doi.org/10.1177/1477370806067911>
- Kotarumalos, N. A. (2004). Tawuran: Kerusuhan atau perkelahian antar geng. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 13, 95-103.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE.
- Loveluck, B. (2019). The many shades of digital vigilantism. A typology of online self-justice. *Global Crime*, 00(00), 1-29. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1614444>
- Maksum, A. (2009). Konflik kekerasan antarkelompok perguruan pencak silat di Madiun: Proses pembentukan identitas sosial yang terdistorsi. *Indonesia Psychological Journal "Anima,"* 24(2), 1-28. <http://anima.ubaya.ac.id/class/openpdf.php?file=1371801365.pdf>
- Mauliate, A. B., Nurlambang, T., & Ludiyo, D. (2014). *Wilayah tawuran dan wilayah damai tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat*. Universitas Indonesia.
- McLeod, S. (2008). *Social identity theory*. <https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html>
- Munawar. (2013). Hubungan konflik antarwarga dengan keamanan kemanusiaan dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (Studi tawuran warga di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat 2010-2011). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(1), 26-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.6767>
- Muntaza. (2011). Memahami konflik sumber daya ekonomi: Suatu analisa sirkuit kapital di perkotaan. In A. Tohari (Ed.), *Dinamika konflik dan Kekerasan di Indonesia* (pp. 135-156). Institut Titian Perdamaian dan TIFA Foundation.
- Naufal, M. (2019). *Kebijakan publik dan konflik sosial: Implementasi kebijakan penanganan tawuran di Manggarai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*. Universitas Islam Negeri Jakarta. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49188/1/MUHAMMAD_NAUFAL.FISIP.pdf
- Neubaum, G., Rösner, L., Ganster, T., Hambach, K., & Krämer, N. C. (2018). United in the name of justice: How conformity processes in social media may influence online vigilantism. *Psychology of Popular Media Culture*, 7(2), 185-199. <https://doi.org/10.1037/ppm0000112>
- Neuendorf, K. A., & Kumar, A. (2015). Emerging trends in content analysis. *The International Encyclopedia of Political Communication*, 1(May), 1-10. <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc065>
- Prihandono, B. K. (2005). Globalisasi kota, politik ruang, dan konflik sosial: Studi perkembangan kota dan konflik antara penguasa kapital global, penguasa lokal, dan sektor informal. *Renai: Kajian Politik Lokal Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 150-169.
- Renz, S. M., Carrington, J. M., & Badger, T. A. (2018). Two strategies for qualitative content analysis: An intramethod approach to triangulation. *Qualitative Health Research*, 28(5), 824-831. <https://doi.org/10.1177/1049732317753586>
- Ruwaida, I. (2017). Merajut harmoni sosial. In D. I. Y. I. Ruwaida (Ed.), *Perang tanpa alasan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kasus tawuran di komunitas pemuda Johar Baru Jakarta Pusat* (pp. 98-120). Pustaka Obor.
- Saputra, D. Y. (2011). Pola, varian, dan persebaran konflik dan kekerasan di Indonesia (2008-2010). In A. Tohari (Ed.), *Dinamika konflik dan kekerasan di Indonesia* (pp. 1-51). Institut Titian Perdamaian.
- Simone, A., & Fauzan, A. U. (2012). Making security work for the majority: Reflections on two districts in Jakarta. *City and Society*, 24(2), 129-149. <https://doi.org/10.1111/j.1548-744X.2012.01072.x>
- Soeharto, B. W. (2013). *Menangani konflik di Indonesia*. Kata Hasta Pustaka.
- Sumarno, S. (2014). Problema dan resolusi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru - Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsial*, 3(2), 1-16.

- Tadie, J. (2009). *Wilayah kekerasan di Jakarta*. Masup Jakarta.
- Tadjoeddin, M. Z. (2002). Anatomy of social violence in the context of transition: The case of Indonesia, 1990-2001. *Politics, Administration and Change*, 38, 1-35.
- Tadjoeddin, M. Z., Chowdhury, A., & Murshed, S. M. (2012). *Routine violence in Java, Indonesia: Neo-Malthusian and social justice perspectives*. November 2010, 633-650. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28626-1_31
- Trottier, D. (2017). Digital vigilantism as weaponisation of visibility. *Philosophy and Technology*, 30(1), 55-72. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4>
- Trottier, D. (2019). Denunciation and doxing: Towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, 0(0), 1-17. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1591952>
- Umar, M., & Anom, E. (2011). *Laporan Hasil Penelitian Tawuran di Johar Baru Jakarta Pusat, Juli-Agustus 2011*. <https://musniumar.wordpress.com/2011/10/08/laporan-hasil-penelitian-tawuran-di-johar-baru/>
- Wibisono, H. K. (2018). *Media sosial jadi arena vigilantisme digital jelang pemilu 2019*. <https://theconversation.com/media-sosial-jadi-arena-vigilantisme-digital-jelang-pemilu-2019-101632>
- Wirutomo, P. (2016). Dealing with brawls in Jakarta's slum area : Pursuing social development through social engagement . *The Senshu Social Well-Being Review*, 3(3), 93-109. <https://doi.org/10.34360/00008030>
- Wirutomo, P., & Darmajanti, L. (2017). Kemiskinan, eksklusi sosial: Analisis struktur-kultur-proses. In D. I. Yasmine & I. Ruwaida (Eds.), *Perang tanpa alasan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kasus tawuran di komunitas pemuda Johar Baru Jakarta Pusat* (pp. 24-60). Pustaka Obor.
- Yasmine, D. I. (2017). Tawuran pemuda: "Jangan pandang kami sebelah mata." In D. I. Yasmine & I. Ruwaida (Eds.), *Perang tanpa alasan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kasus tawuran di komunitas pemuda Johar Baru Jakarta Pusat* (pp. 61-97). Pustaka Obor.